



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

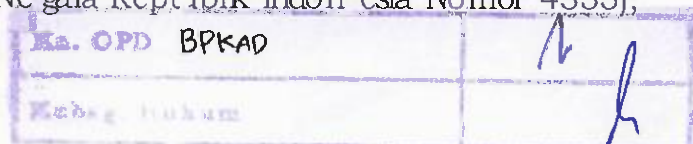
Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 669, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan



- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);
 18. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 17 Seri A Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Seri A Tahun 2022).

Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

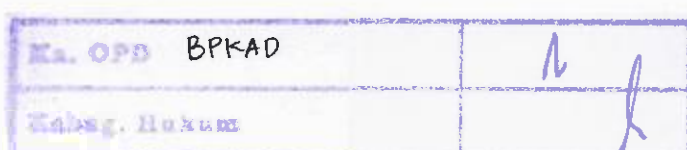
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas :

1. Pendapatan

Uraian		Anggaran		Realisasi	
a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	104.667.737.165,43	Rp	88.534.302.222,79
b.	Dana Perimbangan	Rp	811.275.802.666,96	Rp	868.259.629.159,00
c.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	15.114.466.810,00	Rp	9.116.562.372,00
	Jumlah	Rp	931.058.006.642,39	Rp	965.910.493.753,79

2. Belanja

Uraian		Anggaran		Realisasi	
A.	Belanja Operasi				
a.	Belanja Pegawai	Rp	354.687.250.354,00	Rp	340.559.407.327,00
b.	Belanja Barang	Rp	343.034.888.018,00	Rp	315.990.239.015,36
c.	Belanja Hibah	Rp	19.161.550.667,00	Rp	15.154.171.375,00
d.	Belanja Bantuan Sosial	Rp	8.260.640.392,00	Rp	8.003.955.521,00
	Jumlah A	Rp	725.144.329.431,00	Rp	679.707.773.238,36
B.	Belanja Modal				
a.	Belanja Modal Tanah	Rp	0,00	Rp	0,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	33.503.134.672,00	Rp	30.522.088.004,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	44.990.309.999,00	Rp	23.708.809.580,03



d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	25.252.420.250,00	Rp	23.794.316.695,30
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	1.655.233.081,00	Rp	1.153.600.081,00
	Jumlah B	Rp	105.401.098.002,00	Rp	79.178.814.360,33
C.	Belanja Tidak Terduga				
a.	Belanja Tidak Terduga	Rp	684.313.075,00	Rp	0,00
	Jumlah C	Rp	684.313.075,00	Rp	0,00
D.	Belanja Transfer				
a.	Belanja Bagi Hasil	Rp	4.033.725.515,00	Rp	4.033.725.515,00
b.	Transfer ke Desa	Rp	110.041.229.000,00	Rp	109.981.743.500,00
c.	Transfer Antar Daerah	Rp	200.000.000,00	Rp	200.000.000,00
	Jumlah D	Rp	114.274.954.515,00	Rp	114.215.469.015,00
	Jumlah A + B+C+D	Rp	945.504.695.023,00	Rp	873.102.056.613,69
	Surplus/ (defisit)	Rp	(14.446.688.380,61)	Rp	92.808.437.140,10

3. Pembiayaan

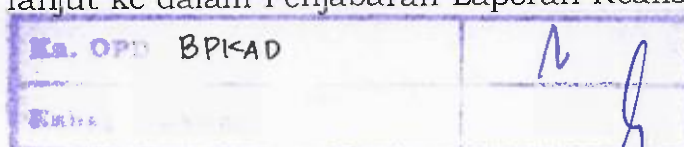
	Uraian		Anggaran		Realisasi
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	14.446.688.380,61	Rp	14.383.364.630,61
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	Rp	0,00
	Pembiayaan Netto	Rp	14.446.688.380,61	Rp	14.383.364.630,61
	SiLPA	Rp	0,00	Rp	107.191.801.770,71

Pasal 2

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.



Halaman 1

Halaman 1 dari 1 halaman. Dokumen ini merupakan...

Halaman 2

Halaman 2 dari 2 halaman. Dokumen ini merupakan...

Halaman 3 dari 3 halaman. Dokumen ini merupakan...

Halaman 4 dari 4 halaman. Dokumen ini merupakan...

Handwritten signature and stamp area.

Halaman 5 dari 5 halaman. Dokumen ini merupakan...

Halaman 6 dari 6 halaman. Dokumen ini merupakan...

Handwritten signature and stamp area.

Halaman 7 dari 7 halaman. Dokumen ini merupakan...

Pusat Koordinasi	
Sejarah Daerah	
Asisten	
Ka. OPD / BKAD	
Kabag. Hukum	
Sejarah OPD BKAD	
Kabid. (Kantor/Korwil, Arsitek)	

Pasal4


Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 25 Agustus 2023


BUPATI BANGKA BARAT,



SUKIRMAN







Diundangkan di Muntok
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,



MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 7 SERI A

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BPKAD	
Kabid. Per bendaharaan, Akuntansi & Kas	
Sub koord PUW	